



The Use of Persuasive Pragmatics in Communicating Education Policies to Address Learning Loss

Isnaeni^{1*}, Nurhayati², Adha Kurnianti³, Nurrahmayani⁴

Email korespondensi: isnaeni@unm.ac.id

¹Faculty of Languages and Literature, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

²Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Indonesia

³Universitas Patompo Makassar, Indonesia

⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Soppeng, Indonesia

ABSTRACT

This study examines how Indonesia's Minister of Primary and Secondary Education (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, employs persuasive pragmatic strategies when conveying education policies related to addressing learning loss after the Covid-19 pandemic. Through discourse analysis of his statements in press conferences and seminars on the implementation of deep learning, this research traces the forms of speech acts such as directives, representatives, and implicatures used to build support and influence how the public understands the policy. The findings show that Abdul Mu'ti underscores the seriousness of the learning-loss problem by referring to concrete data, including the decline in students' cognitive abilities and the results of the 2022 Programme for International Student Assessment (PISA). Presenting these data serves to strengthen his arguments and enhance their persuasive force. In addition, his critique of surface-level learning practices generates an implicature that a shift in instructional approaches is an urgent necessity. His emphasis on the central role of teachers and assurances that the existing curriculum will not be replaced also function as strategies to reduce potential public resistance. This study demonstrates that Abdul Mu'ti's use of language in policy communication plays a crucial role in framing deep learning as a solution for restoring the quality of national education.

Keywords: persuasive pragmatics, education policy, learning loss, speech acts, deep learning

PENDAHULUAN

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi medium untuk membangun pengaruh, menegaskan sikap, dan mengarahkan cara pandang masyarakat. Dalam komunikasi publik, terutama di lingkungan pemerintahan, pemilihan kata dan cara menyusun tuturan sering kali menentukan bagaimana suatu kebijakan diterima oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dan persuasif menjadi bagian penting dari peran seorang tokoh publik. Melalui bahasa, seorang pemimpin dapat menumbuhkan rasa percaya, membangun urgensi, atau bahkan membentuk pemahaman baru mengenai persoalan yang sedang dihadapi bangsa.

Dalam kajian pragmatik, hubungan antara bentuk tuturan dan tujuan penutur menjadi hal yang sangat diperhatikan. Levinson (1983) menjelaskan bahwa pragmatik berfokus pada makna yang muncul dalam konteks, sementara Austin dan Searle menegaskan bahwa setiap tuturan pada dasarnya mengandung tindakan atau *speech act* yang ingin dicapai.

Selain itu, Grice (1975) menyebut bahwa makna tidak selalu disampaikan secara langsung; banyak pesan justru hadir melalui implikatur yang perlu ditafsirkan oleh pendengar. Di sisi lain, pakar komunikasi seperti Perloff (2017) menyatakan bahwa persuasi dalam komunikasi publik tidak hanya bekerja melalui argumentasi rasional, tetapi juga melalui cara bahasa itu dibingkai agar menghasilkan dampak psikologis tertentu. Pendapat para pakar ini menunjukkan bahwa analisis terhadap bahasa tokoh publik memberikan gambaran bagaimana strategi linguistik digunakan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat.

Konteks tersebut menjadi relevan ketika melihat cara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan kebijakan pemulihan *learning loss* pascapandemi Covid-19. Dalam berbagai pernyataannya, Mu'ti menegaskan bahwa ketertinggalan pembelajaran yang dialami siswa tidak bisa dianggap ringan. Ia merujuk pada penurunan kemampuan kognitif dan hasil PISA 2022 sebagai bukti bahwa dunia pendidikan memerlukan penanganan yang lebih serius.

Dalam kesempatan lain, Abdul Mu'ti juga menekankan perlunya mengubah pola pembelajaran dari yang berorientasi hafalan menuju pendekatan *deep learning* yang menekankan pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sikap ini sejalan dengan pandangan Rob Randall (2025), pakar pendidikan dari Australia, yang menyebut bahwa banyak sekolah masih terjebak pada *surface learning* sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.

Tuturan Abdul Mu'ti menarik untuk dianalisis karena tidak hanya menyampaikan kondisi pendidikan secara objektif, tetapi juga disusun dengan strategi bahasa tertentu yang bertujuan membangun dukungan publik terhadap kebijakan *deep learning*. Melalui pilihan kata yang tegas namun tetap berhati-hati, ia menegaskan bahwa perubahan kurikulum tidak akan dilakukan, melainkan memperbaiki pendekatan pembelajaran.

Pernyataan tersebut secara pragmatik dapat dibaca sebagai upaya meredam kekhawatiran masyarakat yang sering muncul setiap kali ada wacana reformasi pendidikan. Dengan demikian, bahasa menjadi alat persuasif untuk menegaskan arah kebijakan sekaligus menjaga stabilitas persepsi publik.

Selain itu, penggunaan bahasa yang bersifat evaluatif dalam menyebut kelemahan pembelajaran permukaan memperlihatkan adanya tindak tutur representatif sekaligus direktif. Ia menggambarkan kenyataan pendidikan saat ini, tetapi sekaligus mendorong perubahan melalui bingkai bahasa yang menyiratkan urgensi.

Strategi seperti ini selaras dengan gagasan Aristoteles dalam retorika, bahwa seorang pemimpin yang ingin membangun keyakinan publik perlu menggabungkan logika, kredibilitas, dan emosi dalam komunikasinya. Dengan kata lain, tuturan Mu'ti tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membangun otoritas moral dan intelektual untuk memperkuat pesan yang ingin ia sampaikan.

Dalam situasi pemulihan pendidikan nasional, penting untuk menelusuri bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen kebijakan. Analisis terhadap tuturan Abdul Mu'ti memberikan gambaran mengenai bagaimana seorang pemimpin mengelola tindak tutur, implikatur, dan pilihan kata sebagai bagian dari strategi persuasif.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji penggunaan strategi pragmatik persuasif dalam penyampaian kebijakan pendidikan mengenai *learning loss* dan *deep learning*. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian pragmatik, khususnya berkaitan dengan penggunaan bahasa tokoh publik dalam membingkai kebijakan serta membangun dukungan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis wacana pragmatik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara bentuk bahasa yang digunakan oleh tokoh publik dengan tujuan sosial dan strategi persuasif yang ingin dicapai.

Dengan kata lain, penelitian tidak sekadar menilai apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara penyampaian tuturan membentuk pemahaman dan sikap audiens. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks, terutama ketika konteks dan makna tuturan menjadi pusat perhatian.

Sumber data penelitian ini berupa tuturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, terkait kebijakan pemulihian *learning loss* dan penerapan *deep learning*, yang diperoleh dari berita daring, transkrip seminar, dan siaran pers resmi. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan observasi teks, sehingga seluruh pernyataan yang relevan dapat dianalisis secara sistematis. Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) menekankan pentingnya pengumpulan data teks dalam penelitian pragmatik agar analisis strategi bahasa dapat dilakukan secara mendalam dan menyeluruh.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten pragmatik. Data dianalisis dengan memperhatikan jenis tindak turur (*speech act*), strategi kesantunan (Brown & Levinson, 1987), serta unsur persuasi yang terdapat dalam tuturan. Proses analisis meliputi tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu memilih tuturan yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data, dengan menyusun kategori strategis seperti *positive politeness*, *negative politeness*, *bald on record*, dan *off record*; serta (3) penarikan kesimpulan, di mana strategi pragmatik yang digunakan dianalisis untuk melihat bagaimana Mu'ti membangun dukungan publik terhadap kebijakan pendidikan.

Keandalan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan tuturan dari berbagai media dan kesempatan yang berbeda. Selain itu, peneliti melakukan validasi dengan merujuk pada teori-teori pragmatik klasik maupun kontemporer untuk memastikan interpretasi terhadap tuturan bersifat objektif dan tidak bias. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap pola penggunaan bahasa persuasif secara komprehensif, serta memberikan wawasan mengenai praktik komunikasi kebijakan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menggunakan berbagai strategi pragmatik persuasif dalam menyampaikan kebijakan pendidikan terkait penanganan *learning loss* pascapandemi Covid-19. Analisis wacana terhadap tuturan beliau di konferensi pers dan seminar mengenai penerapan *deep learning* mengungkapkan pola-pola penggunaan tindak turur yang konsisten untuk membangun dukungan publik dan memengaruhi persepsi audiens terhadap urgensi kebijakan tersebut.

Penggunaan Tindak Tutur Direktif dan Representatif

Mu'ti sering menggunakan tindak tutur direktif untuk mendorong guru dan pihak sekolah memahami pentingnya penerapan *deep learning*. Contohnya, pernyataannya tentang “guru yang diperbaiki dulu” menekankan peran sentral pendidik sebagai agen perubahan.

Selain itu, tindak tutur representatif digunakan untuk menyampaikan fakta dan data yang memperkuat urgensi kebijakan, misalnya penurunan skor PISA 2022 dan bukti menurunnya kemampuan kognitif peserta didik. Penyampaian data ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai strategi persuasif untuk membangun kesadaran akan problematika *learning loss*.

Tabel 1. Penggunaan tindak tutur direktif dan representatif

Jenis Tindak Tutur	Tuturan	Fungsi Persuasif
Direktif	<i>"Guru yang diperbaiki dulu"</i>	Mendorong guru untuk menjadi agen perubahan dan aktif dalam penerapan <i>deep learning</i> .
Representatif	<i>"Skor PISA Indonesia 2022 menurun di semua bidang"</i>	Memberikan fakta konkret untuk memperkuat urgensi kebijakan dan membangun kesadaran publik tentang <i>learning loss</i> .

Implikatur dan Strategi Persuasif Tidak Langsung

Selain secara eksplisit menyampaikan fakta, Mu'ti memanfaatkan implikatur dalam tuturan yang menyoroti kelemahan pendekatan pembelajaran permukaan. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa reformasi pendekatan pembelajaran, khususnya penerapan *deep learning*, merupakan langkah yang mendesak. Strategi implikatur ini efektif karena audiens dapat menyimpulkan kebutuhan perubahan tanpa Mu'ti harus menyatakan secara frontal, sehingga meminimalkan resistensi dari guru maupun masyarakat.

Tabel 2. Implikatur dan strategi persuasif tidak langsung

Jenis Strategi	Tuturan	Fungsi Persuasif
Implikatur	<i>"Banyak sekolah masih terjebak dalam pola pembelajaran permukaan"</i>	Mengisyaratkan kebutuhan mendesak untuk reformasi pembelajaran melalui <i>deep learning</i> .
Indirect Suggestion	<i>"Murid harus memahami konsep secara menyeluruh"</i>	Membimbing audiens menyimpulkan bahwa metode lama tidak efektif tanpa menyatakan kritik secara frontal.

Penekanan pada Peran Guru dan Keberlanjutan Kurikulum

Dalam tuturan persuasifnya, Abdul Mu'ti juga menekankan pentingnya peran guru dan menjamin bahwa kurikulum yang berlaku baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka tidak akan diganti. Hal ini merupakan strategi pragmatik untuk meredakan kekhawatiran publik terhadap perubahan drastis, sekaligus membangun rasa aman dan dukungan terhadap kebijakan baru. Pendekatan ini menegaskan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempertimbangkan efek psikologis dan sosial terhadap audiens.



Tabel 3. Peran guru dan keberlanjutan kurikulum

Aspek Tuturan	Tuturan	Fungsi Persuasif
Peran Guru	"Orang boleh bicara teknologi secanggih apapun, tetapi guru punya peran penting"	Menekankan guru sebagai aktor kunci, membangun dukungan profesional dan legitimasi kebijakan.
Keberlanjutan Kurikulum	"Kami tidak akan mengubah K-13 maupun Kurikulum Merdeka"	Mengurangi kekhawatiran publik terhadap perubahan drastis, meminimalkan resistensi terhadap kebijakan baru.

Deep Learning sebagai Solusi Strategis

Mu'ti memposisikan *deep learning* sebagai solusi utama untuk mengatasi *learning loss*. Pembingkaian ini dilakukan dengan menekankan pemahaman konseptual yang mendalam, penerapan dalam berbagai konteks, dan peningkatan kemampuan berpikir kritis serta kreatif peserta didik. Strategi pragmatik ini memperkuat persepsi publik bahwa perubahan pendekatan pembelajaran bersifat inovatif dan berbasis bukti, bukan sekadar retorika formal.

Tabel 4. Pembingkaian *Deep Learning* sebagai Solusi Strategis

Aspek Pembingkaian	Tuturan	Fungsi Persuasif
Pemahaman Konseptual	"Murid akan memahami suatu konsep secara menyeluruh"	Menunjukkan <i>deep learning</i> sebagai solusi pembelajaran yang lebih efektif dan mendalam.
Penerapan Kontekstual	"Menghubungkan dengan pengetahuan lain serta menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan nyata"	Memperkuat persepsi bahwa <i>deep learning</i> relevan untuk kebutuhan nyata peserta didik.
Peningkatan Kreativitas	"Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa"	Memposisikan kebijakan sebagai inovatif dan berbasis bukti.

Penggunaan bahasa Abdul Mu'ti dalam komunikasi kebijakan pendidikan memperlihatkan kombinasi antara tindak tutur langsung dan strategi implikatur untuk membangun dukungan publik. Fakta konkret, penekanan pada peran guru, jaminan keberlanjutan kurikulum, serta pembingkaian *deep learning* sebagai solusi praktis merupakan inti dari strategi persuasifnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi alat strategis dalam mengkomunikasikan kebijakan pendidikan, membingkai isu kritis, dan mengarahkan persepsi audiens untuk mendukung reformasi pendidikan nasional.

Pembahasan

Sebagai upaya memahami bagaimana komunikasi kebijakan pendidikan dapat memengaruhi persepsi publik, penelitian ini menyoroti strategi bahasa persuasif yang digunakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dalam menghadapi permasalahan *learning loss* pascapandemi Covid-19. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk-bentuk tindak tutur, implikatur, serta strategi pembingkaian yang mampu membangun kesadaran, memotivasi tindakan, dan menegaskan peran guru sebagai penggerak utama perubahan.

Dengan pendekatan pragmatik, kajian ini bertujuan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam konteks kebijakan bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan juga instrumen



strategis untuk membentuk dukungan publik, meminimalkan resistensi, dan menegaskan urgensi reformasi pendidikan melalui penerapan deep learning di sekolah-sekolah Indonesia.

Penggunaan Tindak Tutur Direktif dan Representatif

Analisis menunjukkan bahwa Mendikdasmen Abdul Mu'ti menggunakan tindak tutur direktif untuk mendorong guru dan pihak terkait agar proaktif dalam menangani learning loss. Misalnya, pernyataan mengenai pentingnya guru sebagai agen perubahan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan tenaga pengajar. Dengan cara ini, publik maupun guru diajak untuk melihat tanggung jawab mereka dalam proses pembelajaran sebagai bagian integral dari solusi.

Selain itu, tindak tutur representatif digunakan untuk menyampaikan fakta-fakta konkret, seperti data skor PISA 2022 yang menunjukkan penurunan kemampuan kognitif peserta didik. Strategi ini efektif karena menghadirkan bukti yang dapat dipercaya, sehingga audiens lebih mudah memahami urgensi kebijakan tanpa merasa diberi tekanan secara emosional. Fakta-fakta ini juga membangun kredibilitas Menteri sebagai pengambil kebijakan yang berbasis data.

Penerapan kedua jenis tindak tutur ini secara simultan memperlihatkan upaya persuasif yang terencana. Direktif mendorong tindakan nyata, sementara representatif memperkuat argumen melalui bukti. Kombinasi keduanya membantu membentuk kesadaran publik tentang masalah learning loss, sekaligus membungkai deep learning sebagai solusi yang logis dan mendesak untuk diterapkan di sekolah-sekolah.

Implikatur dan Strategi Persuasif Tidak Langsung

Selain tuturan langsung, Abdul Mu'ti juga memanfaatkan implikatur untuk menyampaikan kritik secara halus. Pernyataan mengenai sekolah yang masih terjebak pada pembelajaran permukaan menunjukkan bahwa metode lama tidak lagi memadai, tetapi disampaikan tanpa menyudutkan pihak tertentu. Strategi ini memungkinkan audiens menarik kesimpulan sendiri mengenai perlunya reformasi pendidikan.

Implikatur semacam ini penting dalam konteks komunikasi publik karena mengurangi potensi resistensi atau reaksi defensif dari guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan memberikan isyarat perubahan yang diperlukan, audiens secara tidak langsung diarahkan untuk mendukung penerapan *deep learning* sebagai pendekatan yang lebih efektif.

Selain itu, penggunaan *indirect suggestion* juga terlihat pada penekanan Mendikdasmen bahwa murid harus memahami konsep secara menyeluruh. Kalimat ini mengandung pesan tersirat bahwa pendekatan sebelumnya tidak cukup, sehingga perubahan strategi pembelajaran menjadi logis dan mendesak. Strategi bahasa semacam ini menunjukkan keahlian persuasif yang mampu membungkai masalah dan solusi secara halus namun efektif.

Penekanan pada Peran Guru dan Keberlanjutan Kurikulum

Salah satu strategi persuasif utama adalah menekankan peran guru sebagai faktor kunci keberhasilan pembelajaran. Abdul Mu'ti menekankan bahwa meskipun teknologi berkembang pesat, guru tetap menjadi pusat proses pendidikan. Pernyataan ini memperkuat posisi guru dan memberikan legitimasi moral bahwa keterlibatan mereka sangat penting dalam implementasi *deep learning*.

Selain itu, penegasan bahwa Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka tetap berlaku menunjukkan upaya untuk menenangkan publik dan mengurangi kekhawatiran akan perubahan drastis. Strategi ini juga berfungsi sebagai bentuk persuasif untuk membangun kepercayaan

masyarakat bahwa kebijakan baru tidak akan merugikan pihak-pihak terkait, melainkan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap.

Dengan memadukan dua strategi ini, Mendikdasmen mampu menyeimbangkan antara urgensi perubahan dan rasa aman bagi audiens. Guru merasa dihargai, orang tua dan masyarakat tidak cemas, sementara pesan mengenai deep learning tetap tersampaikan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana komunikasi kebijakan dapat menggunakan bahasa persuasif untuk membangun dukungan luas tanpa menimbulkan konflik.

Pembingkaiian Deep Learning sebagai Solusi Strategis

Abdul Mu'ti secara konsisten membingkai *deep learning* sebagai solusi yang relevan dan efektif untuk mengatasi learning loss. Dengan menekankan pemahaman konsep yang mendalam, keterkaitan antarpengetahuan, dan penerapan dalam kehidupan nyata, ia menghadirkan solusi yang tidak sekadar teori tetapi nyata dan aplikatif. Strategi ini membuat kebijakan lebih mudah diterima oleh guru dan publik karena jelas manfaat praktisnya.

Selain itu, penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa memperkuat persepsi bahwa *deep learning* bukan hanya pendekatan akademis, tetapi juga investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia. Hal ini membingkai kebijakan sebagai inovasi yang berpihak pada pengembangan kemampuan esensial siswa, sekaligus meningkatkan legitimasi moral kebijakan tersebut di mata publik.

Akhirnya, kombinasi penyampaian fakta, kritik halus terhadap praktik lama, dan pembingkaiian solusi strategis membentuk komunikasi yang persuasif dan efektif. Bahasa yang digunakan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membimbing audiens memahami urgensi masalah, nilai perubahan, dan peran mereka dalam keberhasilan kebijakan. Pendekatan pragmatik ini memperlihatkan bagaimana bahasa dapat menjadi alat strategis dalam implementasi reformasi pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis wacana terhadap pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi pragmatik persuasif memainkan peran penting dalam menyampaikan kebijakan pendidikan terkait penanganan learning loss pascapandemi. Tindak turur direktif dan representatif digunakan secara bersamaan untuk mendorong guru dan pihak terkait agar berperan aktif, sekaligus menyajikan data dan fakta yang memperkuat urgensi kebijakan.

Selain itu, implikatur dan strategi persuasif tidak langsung memungkinkan penyampaian kritik terhadap praktik pembelajaran lama tanpa menimbulkan resistensi, sehingga audiens secara halus diarahkan untuk mendukung penerapan *deep learning*. Penekanan pada peran guru serta jaminan keberlanjutan kurikulum menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan perubahan dengan rasa aman publik, membangun kepercayaan, dan memperkuat legitimasi moral kebijakan.

Akhirnya, pembingkaiian *deep learning* sebagai solusi yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran pascapandemi menunjukkan bahwa bahasa dan strategi komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pemahaman, dukungan, dan keterlibatan publik. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa praktik berbahasa yang persuasif dapat menjadi alat strategis untuk mengimplementasikan reformasi pendidikan secara efektif, sambil memperkuat kredibilitas dan citra moral pemimpin pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford: Oxford University Press.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics: Vol. 3. Speech acts* (pp. 41–58). New York: Academic Press.
- Leech, G. (2014). *The Pragmatics of Politeness*. Oxford University Press.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Mu'ti, A. (2025, Mei 23). *Mendikdasmen: Mengejar "Learning Loss" Cukup Rumit*. Kompas.com. Diakses di <https://www.kompas.com>
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results*. Organisation for Economic Co-operation and Development. Diakses dari risalah resmi OECD atau portal publikasi OECD
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2024, Oktober 22). *Perilisan Hasil PISA 2022: Peringkat Indonesia Naik 5–6 Posisi*. Diakses di <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/pisa/berita/read/pisa-di-indonesia/4/perilisan-hasil-pisa-2022-peringkat-indonesia-naik-5-6-posisi.html> Pusmendik Kemdikbud
- Detik.com. (2023, Desember 07). *Skor PISA Indonesia 2022, Pengamat: Pencapaian Baik tapi Tetap Ada "Learning Loss"*. Diakses di <https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/07/093922271/skor-pisa-indonesia-2022-pengamat-pencapaian-baik-tapi-tetap-ada-learning> Kompas
- Kompas.com. (2023, Desember 06). *Skor Literasi Membaca PISA 2022: Indonesia Turun 12 Poin*. Diakses di <https://www.kompas.com/edu/read/2023/12/06/130124571/skor-literasi-membaca-pisa-2022-indonesia-turun-12-poin> Kompas
- MAKPI (2024, Juli 03). *Tantangan PISA dan Aksesi OECD Indonesia*. Diakses di <https://makpi.or.id/2024/07/03/tantangan-pisa-dan-aksesi-oecd-indonesia/> MAKPI
- Mashuri, M., & Juhring, R. (2023). Pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya dalam situasi yang baru (studi PISA). *Journal of Education Studies*. Diakses dari repository jurnal ToFedu: <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/article/download/525/508/3253> TOFEDU
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Perloff, R. M. (2017). *The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 21st century* (6th ed.). New York: Routledge.
- Rahman, F., & Sulistyo, B. (2022). Strategi komunikasi persuasif dalam penyampaian kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 145-160.
- Randall, R. (2025, Maret). *Deep Learning dan Pendidikan Modern*. Seminar Balai Guru Penggerak, Banten, Indonesia.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford University Press.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.